

## **BAB V.**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang ini adalah perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku kelompok sasaran.

Faktor perilaku organisasi dan antar organisasi semakin penting dalam implementasi kebijakan publik karena dua dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi. SK Bupati Purbalingga No. 521/441 Th. 2022 sebagai komitmen tertulis belum sepenuhnya dijadikan pedoman akibat beragamnya kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan harga jual pupuk bersubsidi lebih tinggi dari HET yang tentu saja merugikan petani. Komitmen organisasi yang tidak dijunjung tinggi akan memperbesar peluang munculnya sikap egosme dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, koordinasi antar pelaksana Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang telah terjalin dengan cukup baik. Namun, koordinasi PPL Kecamatan Rembang dengan KPL dan wilayah binaan mengalami kendala karena kegiatan verifikasi lapangan yang tidak rutin dan banyaknya kelompok tani yang tidak aktif. Pelaksanaan koordinasi yang buruk dalam implementasi kebijakan publik akan dapat menghambat penyelesaian suatu pekerjaan.

Faktor perilaku birokrasi level bawah dengan dua dimensinya yaitu diskresi dan komunikasi penting dalam implementasi kebijakan publik karena birokrat level bawah secara langsung berinteraksi dengan kelompok sasaran sehingga lebih memahami kondisi sebenarnya. Pelaksana Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang telah melaksanakan diskresi terkait dengan kriteria petani sasaran dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Pelaksanaan diskresi yang bertanggung jawab akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik karena memungkinkan pejabat untuk

membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam situasi yang kompleks. Kemudian, penelitian ini memodifikasi pendapat dari Soren C. Winter yaitu dengan menambahkan dimensi komunikasi dalam faktor perilaku birokrasi level bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara PPL Kecamatan Rembang dengan petani belum terjalin dengan baik akibat kelompok tani yang tidak aktif sehingga berdampak besar atas terjadinya beragam persoalan. Komunikasi penting dalam implementasi kebijakan publik karena aktivitas ini berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, dan peraturan kepada pihak yang menerimanya. Komunikasi yang tidak dibangun dengan baik oleh birokrat level bawah maka akan terjadi misinterpretasi dari kelompok sasaran dalam memahami esensi kebijakan publik itu sendiri.

Perilaku kelompok sasaran ditunjukkan melalui respon positif dan negatif. Respon positif dari petani di Kecamatan Rembang timbul karena subsidi yang diberikan mampu meningkatkan daya beli petani atas pupuk industri. Semakin tinggi respon positif terhadap suatu kebijakan publik maka akan meningkatkan penerimaan, dukungan, dan partisipasi aktif dari kelompok sasaran sehingga mempercepat pembentukan budaya dan perubahan yang telah direncanakan. Namun, respon negatif yang tinggi juga ditunjukkan petani untuk persoalan Kartu Tani, waktu untuk memperoleh pupuk, jumlah penerimaan, mutu, pembatasan komoditas tanaman, dan keterbatasan KPL. Respon negatif tinggi ini timbul karena misinterpretasi dalam memahami esensi kebijakan publik sehingga kelompok sasaran merasa ekspektasinya tidak terpenuhi. Respon negatif kelompok sasaran yang tinggi akan mengakibatkan hilangnya dukungan mereka sehingga akan menghambat atau bahkan dalam kondisi yang lebih buruk dapat menggagalkan pencapaian tujuan kebijakan publik.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, rekomendasi yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Merujuk hasil penelitian pada faktor perilaku organisasi dan antar organisasi, KP3 Kabupaten Purbalingga dan Petugas Verval Kecamatan Rembang perlu untuk memaksimalkan lagi fungsi pengawasannya. Ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan verifikasi lapangan secara rutin dan menindak tegas bagi KPL yang terbukti melakukan pelanggaran.
2. Merujuk hasil penelitian pada faktor perilaku birokrasi level bawah, PPL Kecamatan Rembang dan pemerintah desa setempat perlu berkolaborasi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok tani agar pembentukannya tidak sekedar hanya sebagai formalitas, namun juga benar-benar menjalankan perannya secara optimal. Selain itu, perlu juga dilakukan *reshuffle* atau pergantian pengurus yang lebih berkompeten dan berdedikasi bagi kelompok tani yang tidak aktif.
3. Merujuk hasil penelitian pada faktor perilaku kelompok sasaran, PPL Kecamatan Rembang perlu melaksanakan sosialisasi yang lebih masif untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai esensi Kebijakan Subsidi Pupuk. Tidak hanya berhenti disitu, harus dilakukan juga peninjauan kembali atas pemanfaatan pupuk bersubsidi yang diterima petani sebagai langkah mengatasi praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi untuk komoditas selain yang telah ditentukan. Kemudian, BPP Kecamatan Rembang juga perlu memberikan pemahaman dan pelatihan teknis atas penggunaan dosis pupuk secara berimbang dan pemaksimalan penggunaan pupuk kompos dan pupuk kandang sebagai alternatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi. Selanjutnya, diperlukan juga penambahan jumlah KPL di Kecamatan Rembang dengan mempertimbangkan kesesuaian jarak geografis petani.